

**POTENSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
PERTAHANAN (ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP))**

**THE POTENTIAL OF BORDER AREA'S DEVELOPMENT FROM SAMBAS REGENCY,
WEST KALIMANTAN PROVINCE IN DEFENSE ECONOMY PERSPECTIVE
(ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP))**

Muhammad Iqbal Maulana¹, Yudi Sutrasna², Muhammad Halkis³

Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas
Pertahanan

Abstrak - Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis karena tidak hanya potensi alam yang melimpah, namun juga menyangkut pertahanan dan kedaulatan negara. Pentingnya posisi dan peran kawasan perbatasan bagi pertahanan dan kedaulatan negara menyebabkan kawasan perbatasan dijadikan sebagai security belt untuk melindungi negara dari potensi ancaman yang berasal dari luar. Setelah reformasi, pemerintah mulai mengubah orientasi pengelolaan kawasan perbatasan menjadi *outward looking* dan lebih menekankan pada pendekatan kesejahteraan. Namun pendekatan kesejahteraan yang mulai dilakukan oleh pemerintah cenderung kurang diikuti dengan upaya-upaya lanjutan yang bersifat mikro dan berpihak kepada masyarakat kawasan perbatasan. Sehingga terjadi ketimpangan antara pembangunan infrastruktur yang dikembangkan pemerintah dengan pendapatan masyarakat kawasan perbatasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan, solusi, dan keputusan yang tepat dalam membangun kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas (Indonesia, Kalimantan Barat) dengan Malaysia (Sarawak). Melalui pendekatan *Mix Method* dengan aplikasi *Analytic Network Process (ANP)* penelitian berhasil merumuskan strategi pengambilan keputusan tentang prioritas dan korelasi antar sektor pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas (Indonesia, Kalimantan Barat) dengan Malaysia (Sarawak) dalam perspektif ekonomi pertahanan.

Kata Kunci: Kawasan Perbatasan, Ekonomi Pertahanan, Kedaulatan, *Analytic Network Process*, *Decision Making*.

Abstract - Border area is strategically potential for nature resources and also in perspective of defense and state's sovereignty. The importance of position and role of border area may cause the new role of this area as the security belt to protect the state from inside and out threats. Post reformation era, the government started to rebuild the orientation of border area management to be the outward looking and rely on the wealth approach. On the other hand, the implementation of wealth approach cannot be implemented by further efforts which tend to be micro and takes sides to the people from border area. Furthermore, there is inbalanced infrastructure development which made by the government and the income of people from border area. The purpose of this research is to identify the

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

issue, solutions, and right decision making to develop the border area in Sambas Regency (Indonesia, West Kalimantan) with Malaysia (Sarawak). Through the mix method approach and by using the Analytic Network Process (ANP), this research will form the strategy of decision aming about priority and connection within development sector of border Area in Sambas regency (Indonesia, West Kalimantan) with Malaysia (Sarawak) in Defense Economy perspective.

Keyword: Border Area, Defense Economy, Sovereignty, Analytic Network Process, Decision Making.

Pendahuluan

Kawasan perbatasan merupakan sebuah wilayah yang pada umumnya jauh dari pusat pemerintahan dengan aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa yang memiliki karakteristik dan spesifikasi tersendiri. Tingkat kerawanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan lain, karena memiliki peran dan nilai yang strategis dalam upaya mendukung tegaknya kedaulatan negara.⁴ Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus memperhatikan kawasan perbatasan dengan sungguh-sungguh karena termasuk salah satu kawasan kawasan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, serta pertahanan dan keamanan.⁵

Malaysia merupakan negara yang memiliki kondisi kawasan perbatasan yang jauh lebih maju jika dibandingkan dengan negara lain yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia.⁶ Provinsi Kalimantan Barat memiliki kawasan perbatasan yang lebih maju dibandingkan dengan kawasan perbatasan di provinsi lain. Hal ini disebabkan Provinsi Kalimantan Barat memiliki hubungan yang lebih intens dengan Malaysia jika dibandingkan dengan provinsi lain. Kalimantan Barat memiliki tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sedangkan provinsi lain sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan konservasi.⁷ Namun kawasan perbatasan Kalimantan Barat belum mampu bersaing dengan kawasan perbatasan Malaysia dikarenakan kurangnya perhatian dan sikap dari pemerintah pusat dan

⁴ Faisyal Rani, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", *Jurnal Transnasional*, Volume 4, Nomor 1, 2012, hlm. 3.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pasal 10, ayat (3).

⁶ Raharjo, Sandy Nur Ikfal. "Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia: Sebuah Catatan," dalam <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/755-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan>, diakses pada 15 Agustus 2018.

⁷ Enni Lindia Mayona, Salahuddin, dan Rahmi Kusmastuti, "Penyusunan Arah Strategi dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara di Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Tata Loka*, Volume 13, Nomor 2, 2011.

pemerintah daerah mengenai permasalahan yang substansial di perbatasan. Akibatnya menimbulkan kesenjangan ekonomi, ketertinggalan pembangunan, dan keterisolasian kawasan.⁸

Kondisi tersebut disebabkan adanya pendapat di masa lalu mengenai kawasan perbatasan yang dianggap sebagai daerah persembunyian pemberontak dan penyelundup, sehingga perlu diawasi secara ketat.⁹ Selain itu juga diposisikan sebagai halaman belakang, daerah terluar, dan sabuk pengaman (*security belt*) dalam melindungi negara dari potensi ancaman yang berasal dari luar. Sehingga pembangunan di kawasan perbatasan kurang diperhatikan oleh pemerintah dan berorientasi *inward looking*, serta lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) dibandingkan menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Munculnya paradigma baru pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada *outward looking*, maka pembangunan di kawasan perbatasan harus lebih mengutamakan pendekatan

kesejahteraan, dengan tetap memperhatikan dan tanpa harus mengurangi atau menghilangkan aspek keamanan.¹⁰

Setelah Reformasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang menyatakan bahwa pembangunan nasional harus bersifat terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut.¹¹ Daerah-daerah yang dulunya belum atau minim disentuh oleh pembangunan karena lebih menekankan pada pendekatan yang sektoral dan cenderung terpusat, mulai diberikan kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya secara mandiri agar tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat. Salah satu programnya adalah mempercepat pengembangan kawasan perbatasan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan peningkatan hidup sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan terciptanya keamanan serta ketertiban kawasan perbatasan.¹²

⁸ Awang Faroek Ishak, *Membangun Wilayah Perbatasan Kalimantan Dalam Rangka Memelihara dan Mempertahankan Integritas Nasional*, (Jakarta: Indomedia, 2003).

⁹ Mayona, *loc.cit.*

¹⁰ Ishak, *op.cit.*

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, Pasal 2.

¹² *Ibid.*

Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena itu membutuhkan campur tangan, perlakuan, dan pemecahan masalah secara khusus dari pemerintah, mengingat harus menciptakan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sekaligus menjamin kedaulatan wilayah.¹³ Pengelolaan yang memadukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan, yang diikuti dengan orientasi pembangunan kawasan perbatasan secara *outward looking* sudah diupayakan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Menurut Tri Poetranto kawasan perbatasan perlu diperhatikan dengan baik pengelolaannya karena memiliki beberapa nilai strategis, salah satunya karena kawasan perbatasan memberikan pengaruh penting bagi kedaulatan sebuah negara.¹⁴ Namun konsep kedaulatan negara di kawasan perbatasan tidak hanya dikaitkan dengan isu pertahanan dan keamanan saja,

namun juga harus dikaitkan dengan isu-isu lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Karena kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara merupakan suatu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan perbatasan.¹⁵ Hal ini membuktikan bahwa isu-isu yang dibahas berkaitan dengan kedaulatan kawasan perbatasan tidak hanya mengenai pertahanan dan keamanan saja, namun juga mengenai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan perbatasan.

Pengelolaan, pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sebenarnya memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan kawasan lain yang tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain memiliki potensi sumber daya alam, kawasan perbatasan memiliki keuntungan lokasi geografis karena mempunyai akses untuk berinteraksi langsung ke negara tetangga seperti Malaysia, baik melewati jalur darat ataupun jalur laut. Oleh karena itu

¹³ Ishak, *op.cit.*

¹⁴ Tim Pusat Studi Pancasila UGM, *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (Kumpulan Makalah Call for Papers Kongres*

Pancasila VII). (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2015), hlm. 151.

¹⁵ Mita Noveria, et al., *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 12.

kawasan perbatasan dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effects*) karena memiliki potensi strategis dalam mengembangkan kegiatan perdagangan internasional, dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya dalam bidang pengembangan perdagangan, pariwisata, dan industri.¹⁶

Salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung secara daratan ataupun perairan dengan Malaysia (Sarawak) adalah Kabupaten Sambas. Terdapat dua kecamatan di Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia dari jumlah total 19 kecamatan, yaitu Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar. Sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki potensi yang besar, Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah di Kalimantan Barat yang difokuskan pengelolaannya. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Aruk) sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kecamatan Paloh (Desa Temajuk) sebagai Pusat Kegiatan

Lokal pada tahun 2004.¹⁷ Pada tahun 2015, Desa Temajuk (Kecamatan Paloh) dan Desa Aruk (Kecamatan Sajingan Besar) kembali diperkuat perannya sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) di Kalimantan.¹⁸

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah terkait dengan kawasan perbatasan saat ini merupakan sebuah upaya untuk mengubah pengelolaan kawasan menjadi lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah terdahulu menyebabkan terabaikannya hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan, sehingga mengakibatkan daerah-daerah pinggiran seperti kawasan perbatasan menjadi daerah-daerah yang tertinggal, terpencil, dan terisolasi. Meskipun begitu, pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan untuk menangani permasalahan di perbatasan tidak dapat selesai hanya dengan membangun

¹⁶ Sri Handoyo Mukti, "Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Indo-Malay Techno Agropolitan Corridor (IMTAC)", *Buletin Tata Ruang*, September – Oktober 2003, hlm. 8-9.

¹⁷ Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Pasal 15 dan Pasal 16, ayat (2).

¹⁸ Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Pasal 5, ayat (4).

infrastruktur seperti jalan atau PLBN saja. Diperlukan sebuah reorientasi program yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar program-program untuk mengembangkan kawasan perbatasan dapat menjadi penggerak peningkatan PDB di perbatasan, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat di kedua negara.¹⁹ Misalnya pembangunan jalan yang selama ini sudah diupayakan oleh pemerintah memang mampu membuka keterisolasian dan memberikan aksesibilitas bagi masyarakat di perbatasan, namun bukan berarti dengan hadirnya jalan tersebut dapat langsung menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Kebijakan untuk membangun infrastruktur di kawasan perbatasan memang penting dan dibutuhkan, namun kebijakan tersebut perlu diikuti dengan upaya-upaya lanjutan yang bersifat substansial dan berpihak kepada masyarakat agar mampu menangani permasalahan di kawasan perbatasan secara komprehensif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.²⁰ Sehingga adanya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dapat diikuti dengan adanya geliat aktivitas perekonomian.

Ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan, kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dianggap sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman, baik ancaman yang bersifat militer ataupun ancaman yang bersifat non militer melalui penerapan prinsip serta pendekatan ekonomi. Terdapat kekhawatiran mengenai degradasi jiwa kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan jika terjadi perselisihan atau timbul ketegangan dengan negara tetangga. Keberpihakan masyarakat perbatasan kepada negara Malaysia bisa saja terjadi ketika masyarakat perbatasan merasa diabaikan oleh pemerintah Indonesia dan justru mendapatkan keuntungan dan kehidupan yang lebih baik dari Malaysia.²¹

Suatu negara yang berdaulat tidak hanya berperan untuk mempertahankan dan melindungi batas wilayahnya dari

¹⁹ Prasetyono, Agus Puji. "Re-Planning Wilayah Perbatasan Indonesia," dalam <https://www.ristekdikti.go.id/re-planning-wilayah-perbatasan-indonesia/>, diakses pada 24 Agustus 2018.

²⁰ Wijaya Adi, "Pendekatan Ekonomi Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan", *Buletin Kawasan*, Edisi 24, 2010, hlm. 15.

²¹ *Ibid.*

gangguan pihak asing, namun juga berperan untuk hadir di wilayah tersebut melalui program, kebijakan, dan upaya nyata yang berkelanjutan dan komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²² Fokus penelitian ini adalah melakukan identifikasi permasalahan, solusi, dan strategi yang tepat terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan dengan menggunakan *Analytic Network Process* (ANP). Berdasarkan fokus penelitian tersebut, disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur permasalahan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan?
2. Bagaimana perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) struktur permasalahan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan

Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan?

3. Bagaimana sintesis hasil perbandingan berpasangan struktur permasalahan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan?

Metodologi Penelitian

Proses analisis data tentunya membutuhkan teori dan konsep untuk mengkaji apa yang menjadi *output* dari penelitian ini. Ekonomi pertahanan didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari isu-isu terkait pertahanan negara dengan menggunakan prinsip-prinsip dan pendekatan ekonomi.²³ Beberapa prinsip dan pendekatan ekonomi yang dimaksud meliputi optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi alokasi sumber daya nasional, distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi agar dapat dimanfaatkan sebagai upaya pertahanan dalam menghadapi ancaman yang bersifat militer atau yang bersifat non militer.

²² Noveria, *op.cit.*

²³ Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan: Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 4.

Pendapat lain menyatakan bahwa ekonomi pertahanan merupakan suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari isu serta permasalahan ekonomi dalam perspektif pertahanan negara.²⁴ Permasalahan atau isu yang terkait dengan ekonomi seperti kemiskinan, disparitas, pengangguran, ataupun kelangkaan dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi pertahanan negara. Ekonomi pertahanan masih dianggap sangat penting hingga saat ini, khususnya jika dikaitkan dengan alokasi sumber daya dan aplikasi metode ekonomi terhadap isu-isu keamanan.²⁵

Ekonomi mikro secara singkat dapat dipahami sebagai ilmu ekonomi kecil, sesuai dengan namanya yang berarti kecil. Ekonomi mikro dapat diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis dan mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.²⁶ Ekonomi mikro membahas peran dan kegiatan dari individu pelaku ekonomi dalam

menggunakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang ataupun jasa. Teori ekonomi mikro menganalisis isu pokok berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan dengan efisien faktor-faktor produksi yang ada untuk memaksimalkan kemakmuran masyarakat.²⁷

Pembangunan ekonomi (*economic development*) menurut sebagian ahli ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan corak serta struktur kegiatan ekonomi.²⁸ Pembangunan ekonomi saat ini memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur, faktor, dan sikap kelembagaan masyarakat, serta berfokus kepada pengurangan tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dan perluasan penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.²⁹ Tujuan yang ingin dicapai dari

²⁴ Anonim. "Puslit Ekonomi Pertahanan," dalam <http://lppm.idu.ac.id/pusat-penelitian/puslit-ekonomi-pertahanan>, diakses pada 25 Agustus 2018.

²⁵ Hartley, Keith dan Todd Sandler, *Handbook of Defense Economics Volume 1*, (New York: Elsevier Science, 1995), hlm. 7.

²⁶ Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Edisi Ketiga, (Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 11.

²⁷ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 21.

²⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 423.

²⁹ Purnomo Yusgiantoro, *Perekonomian Indonesia*, Limited Edition, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 38.

pembangunan adalah adanya perbaikan dan peningkatan pada sistem serta kualitas kehidupan ekonomi dan sosial dalam suatu kegiatan perekonomian masyarakat secara terus menerus.

Pengembangan wilayah merupakan sebuah upaya yang dilakukan bertujuan untuk memacu perkembangan aspek sosial dan ekonomi, mengurangi kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di suatu wilayah.³⁰ Ketimpangan yang terjadi seperti ini di kawasan perbatasan Indonesia, menyebabkan adanya fenomena *back-wash effects*, yaitu sebuah fenomena yang timbul berupa terhambatnya perkembangan wilayah-wilayah yang masih tergolong terbelakang karena disebabkan adanya wilayah-wilayah yang tergolong lebih maju.³¹ Proses perencanaan pengembangan wilayah perbatasan dapat menggunakan tiga pendekatan,

yaitu dengan mendahulukan pembangunan infrastruktur (*infrastructure led*), mendahulukan investasi di sektor swasta (*investment led*), dan mendahulukan program-program dan kebijakan (*policy led*).³² Pengembangan kawasan perbatasan juga harus dirancang dengan baik dan cermat, berdasarkan pada pertimbangan dan analisis mendalam terhadap potensi, karakteristik, permasalahan, dan kebutuhan nyata di kawasan tersebut.³³ Selain itu juga membutuhkan kebijakan khusus dan tidak bersifat umum, mengingat adanya perbedaan karakteristik antar kawasan perbatasan di Indonesia. Penyelesaian masalah kawasan perbatasan di era otonomi daerah sudah saatnya tidak lagi menjadi domain pemerintah pusat saja meskipun kawasan perbatasan termasuk ke dalam kawasan nasional yang strategis.³⁴

Kawasan perbatasan dikategorikan sebagai salah satu kawasan strategis,

³⁰ Ambardi, Urbanus dan Socia Prihawantoro, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT, 2002).

³¹ Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Under-Developed Regions*, (New York: Harper Torchbooks, 1971).

³² Chung-Tong Wu, "Cross-border Development in a Changing World: Redefining Regional Development Policies", dalam David W Edgington, Antonio L. Fernandez, and Claudia Hoshino, *New Regional Development*

Paradigms: Volume 2 New Regions – Concepts, Issues, and Practices, (Westport: Greenwood Press, 2001).

³³ Zakiyah, Siti. "Kinerja Pelayanan Publik dan Kebutuhan Penataan Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Kalimantan," dalam <https://media.neliti.com/media/publications/196008-ID-kinerja-pelayanan-publik-dan-kebutuhan-p.pdf>, diakses pada 16 September 2018.

³⁴ *Ibid.*

karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan serta keamanan.³⁵ Menurut Martinez (1994), kawasan perbatasan dibagi menjadi 4 (empat) jenis klasifikasi, yaitu *alienated borderland*, *coexistent borderland*, *interdependent borderland*, dan *integrated borderland*.³⁶ Jika merujuk kepada klasifikasi menurut Martinez (1994), maka kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dapat dikategorikan ke dalam jenis *coexistent borderland* dan *interdependent borderland*.³⁷ Jenis klasifikasi kawasan perbatasan seperti ini masih memungkinkan adanya persoalan antar negara di kawasan tersebut. Isu-isu yang terkait dengan kawasan perbatasan merupakan isu yang penting khususnya di kawasan Asia Tenggara. Karena pada tingkatan regional seperti di Asia Tenggara, kawasan perbatasan dapat

menjadi pemicu konflik dan menjadi sumber ancaman bagi Indonesia.

Kesejahteraan sosial diartikan dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁸ Todaro menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari tingkat kualitas hidup masyarakat.³⁹ Kualitas hidup masyarakat meningkat ditandai dengan kemiskinan yang berhasil dientaskan, memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik, mendapatkan tingkat pendidikan yang tinggi, dan meningkatnya produktivitas masyarakat. Tiga elemen utama yang dapat digunakan untuk memahami definisi dari kesejahteraan sosial, yaitu sejauh mana masalah sosial dapat diatur, sejauh mana kebutuhan dapat terpenuhi, dan sejauh mana kesempatan untuk maju (meningkatkan taraf hidup) dapat diperoleh.⁴⁰

³⁵ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pasal 10, ayat (3).

³⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 51-52.

³⁷ Hasyim, Abdul Wahid dan Aris Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 5.

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1, ayat (1).

³⁹ Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jilid 1, Alih Bahasa: Haris Munandar, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 235-236.

⁴⁰ James Midgley, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, (London: SAGE Publications Ltd, 1995), hlm. 14.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *mix method*, yaitu penggabungan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan metode *Analytic Network Process* (ANP). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian dan menggali data serta informasi dari narasumber yang dipandang berkompeten atas permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah data kualitatif yang telah didapatkan sebelumnya, dan kemudian digunakan untuk mengukur prioritas dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP). ANP merupakan sebuah pendekatan baru metode kualitatif yang merupakan pengembangan lanjutan dari metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). ANP merupakan salah satu bagian dari *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) yang berupaya untuk mengambil keputusan dengan menetapkan kriteria

terbaik dari sejumlah kriteria yang ada. ANP merupakan metode pendekatan kualitatif non parametrik dan non *bayesian* untuk proses pengambilan keputusan dengan kerangka kerja yang umum tanpa perlu membuat asumsi-asumsi. ANP merupakan sebuah metode yang menggunakan teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk memperlakukan *dependence* (interaksi) dan *feedback* (umpan balik) secara sistematis dan dapat menangkap serta mengkombinasikan faktor-faktor *tangible* dan *intangible*.⁴¹

Metode ANP cenderung diabaikan jika dibandingkan dengan metode AHP yang berstruktur linear (hirarki) dan tidak mengakomodasikan adanya umpan balik (*feedback*). Hal ini disebabkan AHP relatif lebih sederhana dan mudah untuk diterapkan, sedangkan ANP lebih dalam dan luas, kompleks, cocok diterapkan pada pengambilan keputusan yang rumit, serta memerlukan berbagai variasi interaksi dan ketergantungan.⁴² Konsep utama dalam metode AHP adalah preferensi (*preference*), sedangkan konsep utama dalam metode ANP adalah pengaruh (*influence*). Sehingga dalam

⁴¹ Thomas L. Saaty, *Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process*, (Pittsburgh: RWS Publications, 1996).

⁴² Rusydiana, Aam Slamet dan Abrista Devi, *Analytic Network Process: Pengantar Teori & Aplikasi*, (Bogor: SMART Publishing, 2013).

penggunaan *judgments*, ANP mempertanyakan pengaruh yang lebih besar antar elemen, sedangkan dalam AHP mempertanyakan elemen yang lebih disukai atau lebih penting.

Menentukan urutan prioritas pendapat dari para responden, baik individu ataupun kelompok, dilakukan penilaian dengan cara menghitung *geometric mean*.⁴³ Pertanyaan yang disusun dalam kuisisioner berupa perbandingan berpasangan akan dikombinasikan sehingga menjadi sebuah konsensus. Sedangkan ukuran dalam menentukan tingkat kesepakatan para responden terhadap suatu masalah dalam suatu *cluster* menggunakan *rater agreement*. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesepakatan para responden ini adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W < 1$).⁴⁴ Apabila nilai kesepakatan adalah 1 ($W=1$), maka terjadi kesepakatan sempurna antar responden penelitian. Namun jika nilai kesepakatan adalah 0 atau mendekati 0, maka kesepakatan antar responden tidak sempurna atau memiliki kesepakatan yang rendah.

⁴³ Saaty, Thomas L dan Luis G. Vargas, *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social, and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks*, (USA: Springer, 2006).

Subjek dalam penelitian ini adalah para pakar atau ahli yang memahami pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian. *Purposive sampling* merupakan sebuah teknik atau metode pengambilan sampel penelitian yang didasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu, seperti peran dan pemahaman (kompetensi) dari subjek penelitian atas objek yang akan diteliti.⁴⁵ Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang, yang merupakan para pakar yang memiliki peran dan keahlian terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan. Patokan kevalidan responden dalam metode ANP bukan berdasarkan jumlah, namun berdasarkan pada syarat bahwa responden tersebut merupakan orang-orang yang ahli dan kompeten dalam bidangnya.⁴⁶

⁴⁴ Rusydiana dan Devi, *op.cit.*, hlm. 42.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014).

⁴⁶ Ascarya dan Diana Yumanita, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di

Hasil dan Pembahasan

Struktur Permasalahan

Menstruktur permasalahan atau melakukan dekomposisi masalah pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan dengan menggunakan metode ANP dibutuhkan agar permasalahan mudah untuk dipahami. Proses dekomposisi masalah dilakukan untuk mengidentifikasi, mengurai, dan menyusun permasalahan ke dalam kerangka jaringan *cluster*. Dekomposisi masalah atau struktur permasalahan dalam pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan terbagi menjadi 7 (tujuh) *cluster*.

Cluster pertama dalam kerangka jaringan ANP dalam penelitian ini adalah tujuan, yaitu pembangunan kawasan perbatasan dalam perspektif ekonomi pertahanan. *Cluster* kedua adalah aspek, terdiri dari empat elemen yaitu masalah makro, masalah mikro, solusi makro, dan solusi mikro. *Cluster* ketiga adalah masalah makro, terdiri dari empat elemen yaitu peluang pasar, jumlah penduduk,

kerjasama perdagangan, dan ketergantungan. *Cluster* keempat adalah masalah mikro, terdiri dari empat elemen yaitu akses modal minim, pengelolaan SDA, kemiskinan dan kesenjangan, serta sarana dan prasarana kegiatan ekonomi. *Cluster* kelima adalah solusi makro, terdiri dari empat elemen yaitu iklim investasi kondusif, transmigrasi, ciptakan interaksi positif, dan perencanaan wilayah. *Cluster* keenam adalah solusi mikro, terdiri dari empat elemen yaitu beri akses modal, optimalisasi SDA berkelanjutan, menyerap tenaga kerja, dan peralatan bisnis. *Cluster* ketujuh adalah strategi, terdiri dari lima elemen yaitu penguatan kapasitas pemda, peningkatan kualitas SDM, kebijakan afirmatif, bentuk DOB, dan beri ruang NGO.

Pembandingan Berpasangan

Hasil dekomposisi masalah yang telah didapatkan sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun kuisisioner dalam tahapan pembandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Proses tahapan pembandingan berpasangan merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan prioritas lokal dari semua elemen-elemen dalam

Perbankan Syariah Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juni 2005.

sebuah *cluster* dilihat dari *cluster* induknya.⁴⁷ Perbandingan berpasangan ini dilakukan dengan cara pengukuran ke dalam skala rasio untuk mencerminkan proporsi. Kuisisioner perbandingan berpasangan dirancang berdasarkan kerangka jaringan ANP. Kuisisioner tersebut kemudian disebar kepada para responden yang dianggap menguasai permasalahan atau memiliki peran serta keahlian yang berkaitan dengan objek penelitian.

Kuisisioner ANP memiliki pertanyaan berupa perbandingan berpasangan antar elemen di dalam *cluster*. Pertanyaan perbandingan berpasangan ini bertujuan untuk mengetahui mana yang lebih besar pengaruhnya di antara dua elemen yang dibandingkan, dan mengetahui besaran perbedaannya dengan menggunakan skala rasio satu hingga sembilan. Hasil yang didapat dari penyebaran kuisisioner kepada para responden kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi *Super Decision* untuk kemudian diolah berdasarkan kerangka jaringan ANP yang telah dirancang sebelumnya. Kerangka jaringan ANP memiliki *feedback* yang saling berhubungan dalam memberikan

penilaian prioritas, sehingga dapat memberikan hasil yang jauh lebih akurat dan stabil.

Hasil olahan data menghasilkan urutan prioritas dari masing-masing aspek, elemen masalah, elemen solusi, dan strategi. Output yang ingin dihasilkan dari tahapan pengolahan data adalah melakukan sintesa, menentukan urutan prioritas, dan menentukan tingkat kesepakatan (*rater agreement*). Pada tahapan terakhir, hasil yang didapatkan dari pengolahan data dilakukan interpretasi hasil untuk dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan dan saran. Pada tahapan ini, hasil pengolahan data akan menunjukkan hasil keseluruhan dari perbandingan berpasangan beserta kecenderungan dari setiap responden berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan.

Sintesa

Berdasarkan hasil olahan data pada *cluster* aspek, meskipun memiliki empat elemen, namun secara umum data dibagi menjadi dua sisi yaitu sisi masalah dan sisi solusi. Sisi masalah memiliki dua elemen

⁴⁷ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 2.

yakni elemen mikro dan makro, sedangkan sisi solusi juga memiliki dua elemen yang sama yaitu elemen mikro dan makro. Elemen mikro merupakan elemen yang ditinjau dari skala yang kecil (masyarakat), sedangkan elemen makro merupakan elemen yang ditinjau dari skala yang lebih besar (negara). Secara keseluruhan, *Geometric Mean* dari kelima responden menyatakan bahwa masalah makro merupakan masalah yang paling prioritas dibandingkan dengan masalah mikro dalam pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan ($GM = 0,33$), dengan tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden adalah sebesar 36 persen ($W = 0,36$).

Sedangkan pada prioritas solusi, hasil komparatif data keseluruhan responden (*Geometric Mean*) menyatakan bahwa solusi yang ditinjau secara makro merupakan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan ($GM = 0,26$).

Masalah makro yang menjadi prioritas menurut keseluruhan responden adalah peluang pasar (0,37). Peluang pasar yang jauh lebih besar di kawasan perbatasan cenderung belum dimanfaatkan secara optimal, karena belum memberikan dampak bagi perkembangan masyarakat dan daerah perbatasan. Kesulitan yang dihadapi oleh kawasan perbatasan untuk memanfaatkan peluang pasar dan mengembangkan pasar untuk hasil produksinya disebabkan adanya wilayah yang cenderung lebih maju (Malaysia). Kesulitan tersebut disebabkan oleh pola dan aktivitas perdagangan yang didominasi oleh wilayah yang tergolong lebih maju, sehingga menyebabkan fenomena *back-wash effects*.⁴⁸

Prioritas kedua masalah makro adalah kerjasama perdagangan (0,27). Kurniadi menyatakan bahwa pengembangan suatu kawasan memiliki kaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan, dan dua hal tersebut berkaitan dengan aktivitas perdagangan.⁴⁹ Sebagai beranda depan negara dan gerbang aktivitas ekonomi, seharusnya

⁴⁸ Myrdal, *loc.cit.*

⁴⁹ Dendy Kurniadi, "Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten

Sanggau Provinsi Kalimantan Barat", *Tesis Magister*, (Semarang: Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Teknik Pembangunan

perdagangan yang terjadi di kawasan perbatasan dapat dioptimalkan dengan baik. Hasil yang didapatkan dari kerjasama perdagangan yang optimal adalah mampu memberikan dampak bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan perbatasan.

Prioritas ketiga masalah makro adalah jumlah penduduk (0,21). Jumlah penduduk yang mendiami kawasan perbatasan relatif sedikit, jarang, dan tidak merata. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perpindahan penduduk kawasan perbatasan untuk mendekati pusat-pusat kegiatan perekonomian yang cenderung lebih maju dibandingkan dengan kawasan perbatasan. Menurut Hartley, fenomena migrasi penduduk dalam perspektif ekonomi pertahanan dapat menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dan ancaman di kawasan perbatasan.⁵⁰ Selain itu, timbulnya faktor perpindahan penduduk ini juga menjadi salah satu penyebab timbulnya fenomena *back-wash effects*, yaitu fenomena terhambatnya perkembangan wilayah yang tergolong

terbelakang karena adanya wilayah yang tergolong lebih maju.⁵¹ Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden terkait prioritas masalah makro adalah sebesar 77 persen (W = 0,77).

Masalah mikro yang menjadi prioritas menurut keseluruhan responden adalah sarana dan prasarana kegiatan ekonomi (0,36). Upaya pengembangan kawasan perbatasan seharusnya dirancang dengan baik dan cermat, berdasarkan pada pertimbangan dan analisis mendalam terhadap potensi, karakteristik, masalah, dan kebutuhan nyata di kawasan tersebut.⁵² Sehingga fokus upaya pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan adalah untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat di kawasan perbatasan berdasarkan pada potensi, karakteristik, dan masalah yang ada. Pembangunan PLBN memang diperlukan untuk mengubah stigma negatif kawasan perbatasan yang dianggap terbelakang, namun penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi seperti

Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, 2009).

⁵⁰ Emanuel Ario Bimo, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Natuna dalam Perspektif EKonomi Pertahanan", *Tesis Magister*, (Bogor:

Fakultas Manajemen Pertahanan, Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2018).

⁵¹ Myrdal, *loc.cit.*

⁵² Zakiyah, *loc.cit.*

jalan, pasar, transportasi, dan teknologi jauh lebih dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Ketidak ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi akan menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan, khususnya pada peningkatan produksi dan pemasaran hasil produksi.

Prioritas kedua masalah mikro adalah akses modal minim (0,23). Menurut Mankiw, biaya merupakan sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan berdasarkan kesempatan-kesempatan yang ada.⁵³ Salah satu bentuk biaya yang dimaksudkan oleh Mankiw adalah modal, dimana modal merupakan salah satu hal penting untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha. Biaya merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan selain *labor* (tenaga kerja), *land* (tanah), dan kewirausahaan dalam melakukan produksi. Kekurangan modal memberikan dampak kepada terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat seperti proses produksi

barang dan jasa. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa menjadi standar hidup bagi negara tersebut. Semakin produktif suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa, maka semakin tinggi pula standar hidup suatu negara.⁵⁴

Prioritas ketiga masalah mikro adalah pengelolaan SDA (0,22). Masalah pengelolaan SDA khususnya pada era globalisasi seperti saat ini menyebabkan kompleksitas permasalahan di kawasan perbatasan semakin bertambah. Hal ini disebabkan kaburnya batas negara dan menimbulkan fenomena *borderless*, sehingga berpengaruh terhadap kepemilikan, alokasi, dan distribusi sumber daya di kawasan perbatasan. Dalam ilmu ekonomi pertahanan, permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dianggap sebagai salah satu sumber utama konflik dan dapat menimbulkan ancaman bagi negara.⁵⁵ . Pengelolaan SDA yang belum optimal dan terkendali dapat menimbulkan ancaman bagi negara, yaitu kehilangan kekayaan alam dan sumber daya ekonomi.⁵⁶ Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden dalam menentukan

⁵³ N. Gregory Mankiw, *Principles of Microeconomics*, Second Edition, (Philadelphia: Harcourt College Publishers, 2001).

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Hartley dan Sandler, *loc.cit.*

⁵⁶ Hikam, *op.cit.*, hlm. 338.

prioritas masalah mikro adalah sebesar 26 persen ($W = 0,26$).

Solusi makro yang menjadi prioritas keseluruhan responden adalah iklim investasi kondusif ($0,33$). Solusi iklim investasi kondusif diperlukan oleh kawasan perbatasan agar dapat mengalokasikan dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan. Menurut Wu, mendahulukan investasi di sektor swasta (*investment led*) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pengembangan wilayah di kawasan perbatasan.⁵⁷ Apabila iklim investasi di kawasan perbatasan kondusif, maka dapat mendatangkan pihak swasta untuk ikut terlibat dalam mengembangkan kawasan perbatasan. Keterlibatan pihak swasta tersebut misalnya dapat untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dan prioritas yang dapat dikembangkan, sekaligus menerapkan langkah-langkah untuk mengembangkannya.

Prioritas kedua solusi makro adalah perencanaan wilayah ($0,30$). Perencanaan wilayah yang baik di kawasan perbatasan dapat menjadi salah

satu cara untuk pengembangan kawasan perbatasan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat kawasan perbatasan, pengelolaan potensi wilayah, dan terciptanya keamanan serta ketertiban kawasan perbatasan.⁵⁸ Pengembangan wilayah dapat terealisasi dengan baik dan efektif jika konsep atau model pengembangan wilayah juga direncanakan dengan baik. Menurut Tarigan, dalam melakukan perencanaan pengembangan wilayah terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral berfokus kepada sektor-sektor kegiatan yang terdapat di wilayah tersebut, sedangkan pendekatan regional berfokus kepada pemanfaatan ruang suatu wilayah beserta interaksi yang dapat dilakukan di wilayah tersebut.⁵⁹

Prioritas ketiga solusi makro adalah ciptakan interaksi positif ($0,22$). Interaksi yang terjalin antara masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia sudah terjadi sejak lama. Faktor kemudahan akses dan kesamaan etnis serta budaya menjadi penyebab utama

⁵⁷ Wu, *loc.cit.*

⁵⁸ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, Pasal 2.

⁵⁹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

adanya interaksi antar masyarakat di kedua negara. Namun interaksi yang terjadi antar masyarakat di kedua negara belum terjadi secara positif, karena masih bersifat tradisional, berskala mikro, dan ilegal. Pemerintah pusat perlu menciptakan interaksi yang positif dengan negara tetangga, sehingga dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan SDA yang dimiliki oleh kawasan perbatasan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kawasan perbatasan. Penciptaan interaksi yang positif salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberikan perluasan fungsi dan peran pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga. Pemberian perluasan fungsi dan peran pemda dapat mempersingkat jarak birokrasi tanpa harus tergantung pada pemerintahan pusat, khususnya pada era otonomi daerah seperti sekarang. Sehingga dapat menciptakan interaksi yang positif dan menguntungkan, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor dan impor, serta berkurangnya kegiatan perdagangan ilegal. Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden terkait

prioritas solusi makro adalah sebesar 45 persen ($W = 0,45$).

Solusi mikro yang menjadi prioritas menurut keseluruhan responden adalah optimalisasi SDA berkelanjutan (0,292). Optimalisasi SDA berkelanjutan termasuk salah satu prinsip dan pendekatan ekonomi yang biasa dikaitkan dengan isu-isu pertahanan negara.⁶⁰ SDA kawasan perbatasan yang berlimpah harus dikelola secara koordinatif, sehingga dapat meminimalisir eksploitasi SDA secara berlebihan, tidak terkendali, dan ilegal. Optimalisasi SDA berkelanjutan dapat dilakukan dengan mendayagunakan sarana dan prasarana, serta teknologi berbasis kearifan lokal. Selain itu, optimalisasi SDA berkelanjutan dapat menjawab masalah alokasi sumber daya, alokasi sumber daya dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk dikaitkan dengan isu-isu keamanan.⁶¹

Prioritas kedua solusi mikro adalah beri akses modal (0,291). Pemberian akses modal kepada masyarakat yang berada di kawasan perbatasan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha. Namun adanya kesulitan akses modal

⁶⁰ Yusgiantoro, *op.cit.*, hlm. 5.

⁶¹ Hartley dan Sandler, *loc.cit.*

dapat memberikan dampak kepada terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat seperti pada proses produksi barang dan jasa. Padahal jika kegiatan usaha masyarakat produktif, maka dapat memberikan pengaruh kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Menurut Midgley, salah satu elemen yang dapat digunakan untuk memahami kesejahteraan sosial adalah sejauh mana kesempatan atau peluang untuk maju dan meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh oleh masyarakat.⁶²

Prioritas ketiga solusi mikro adalah menyerap tenaga kerja (0,22). Penyediaan lapangan pekerjaan di kawasan perbatasan dibutuhkan agar dapat menyerap tenaga kerja, sehingga mampu mengurangi aktivitas migrasi masyarakat kawasan perbatasan menuju pusat kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja baik di kawasan perbatasan ataupun tidak merupakan salah satu tujuan utama dalam proses pembangunan.⁶³ Menurut Kurnia, terdapat hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan tingkat kecintaan rakyat kepada tanah air. Kurnia

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyat maka akan semakin besar cinta rakyat kepada tanah airnya, dan semakin rendah tingkat kesejahteraan rakyat maka akan semakin kecil kecintaan rakyat kepada tanah airnya.⁶⁴ Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden dalam menentukan prioritas solusi mikro adalah sebesar 29 persen ($W = 0,29$).

Hasil terakhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat strategi prioritas yang dapat meningkatkan dan mendukung pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan. Strategi prioritas dalam pembangunan kawasan perbatasan menurut keseluruhan responden adalah penguatan kapasitas pemda (0,29). Beberapa pemerintah daerah (pemda) telah memiliki lembaga khusus yang ditugaskan untuk mengelola kawasan perbatasan. Namun kapasitas lembaga tersebut belum memadai untuk mengelola dan membangun kawasan perbatasan, karena hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Akibatnya pengelolaan dan

⁶² Midgley, *op.cit.*, hlm. 14.

⁶³ Todaro dan Smith, *op.cit.*, hlm. 27.

⁶⁴ Mahendra Putra Kurnia, *Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan*

Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Spasial, (Malang: UB Press, 2010), hlm. 247.

pembangunan kawasan masih bersifat terpusat, sektoral, dan cenderung kurang tepat sasaran kepada masyarakat kawasan perbatasan. Pada era otonomi daerah sekarang ini, penyelesaian masalah yang ada di kawasan perbatasan sudah saatnya tidak lagi menjadi wewenang atau domain pemerintah pusat saja, meskipun kawasan perbatasan termasuk ke dalam kawasan nasional yang strategis.⁶⁵ Penguatan kapasitas kelembagaan pemda dalam mengelola dan membangun kawasan perbatasan perlu untuk dilakukan dan direvitalisasi peran dan fungsinya. Menurut Zakiyah, pemerintah daerah perlu untuk diberikan wewenang lebih dalam mengembangkan dan membangun kawasan perbatasan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berdasarkan pada potensi lokal yang dimiliki.⁶⁶

Prioritas kedua strategi adalah peningkatan kualitas SDM (0,26). Peningkatan kualitas SDM perbatasan diperlukan agar dapat berkontribusi dan berperan aktif serta menjadi salah satu aktor penting dalam mengelola dan membangun kawasan perbatasan. Kontribusi aktif yang misalnya bisa

dilakukan adalah dengan menjadikan SDM perbatasan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah di kawasan perbatasan. Peningkatan kualitas SDM perbatasan juga dapat memberikan dampak bagi pengelolaan dan penggunaan SDA yang melimpah di kawasan perbatasan. Peran dan kegiatan yang dilakukan oleh individu pelaku ekonomi di kawasan perbatasan dalam mengelola, menggunakan, dan mengalokasikan SDA untuk memproduksi barang dan jasa secara efisien dapat berpengaruh kepada pemaksimalan kemakmuran masyarakat.⁶⁷ Dalam kajian ekonomi makro, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang harus dialokasikan untuk mampu memaksimalkan produksi, perdagangan, dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.⁶⁸

Prioritas ketiga strategi adalah kebijakan afirmatif (0,23). Strategi ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Wu, bahwa salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan wilayah di kawasan perbatasan adalah dengan mendahulukan program-program dan

⁶⁵ Zakiyah, *loc.cit.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Sukirno, *loc.cit.*

⁶⁸ Yusgiantoro, *op.cit.*, hlm. 12.

kebijakan (*policy led*).⁶⁹ Upaya pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan masalah yang sangat kompleks, oleh karena itu membutuhkan campur tangan, perlakuan, dan pemecahan masalah secara khusus dari pemerintah.⁷⁰ Penyediaan kebijakan afirmatif merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka campur tangan dalam memecahkan masalah pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan. Penyediaan kebijakan afirmatif misalnya dapat dilakukan dengan cara merubah tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan yang masih menggunakan peraturan yang bersifat umum. Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden dalam menentukan prioritas strategi untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan adalah sebesar 68 persen ($W = 0,68$).

Kesimpulan

Struktur permasalahan pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas

Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan terbagi menjadi 7 (tujuh) *cluster* yang saling terhubung dan melakukan *feedback*.

Pembandingan berpasangan dilakukan dengan cara menyebar kuisioner kepada lima responden yang menguasai permasalahan atau memiliki keahlian serta peran yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya proses pembandingan berpasangan diukur ke dalam skala rasio untuk mencerminkan proporsi. Tahapan pembandingan berpasangan pada struktur permasalahan pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar elemen yang dibandingkan serta mengetahui besaran perbedaannya.

Hasil pembandingan berpasangan struktur permasalahan pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan yang didapatkan dari semua responden kemudian diolah dalam aplikasi *Super Decision* dan *Microsoft Excel*. Hasil pengolahan data menghasilkan *output* berupa sintesa, urutan prioritas, dan tingkat kesepakatan (*rater agreement*).

⁶⁹ Wu, *loc.cit.*

⁷⁰ Ishak, *loc.cit.*

Hasil sintesis perbandingan berpasangan struktur masalah kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Pada *cluster* aspek, masalah prioritas dalam pembangunan kawasan perbatasan menurut keseluruhan responden adalah masalah makro (GM = 0,33) dan masalah mikro (GM = 0,20), dengan tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden sebesar 36 persen (W = 0,36). Sedangkan Solusi prioritas dalam pembangunan kawasan perbatasan menurut keseluruhan responden adalah solusi makro (GM = 0,26) dan solusi mikro (GM = 0,18), dengan tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden hanya sebesar 4 persen (W = 0,04).
2. Pada *cluster* masalah makro, secara berurutan yang menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan adalah peluang pasar (0,37), kerjasama perdagangan (0,27), jumlah penduduk (0,21), dan ketergantungan (0,13). Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden terkait prioritas masalah makro adalah sebesar 77 persen (W = 0,77).
3. Pada *cluster* masalah mikro, secara berurutan yang menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan adalah sarana dan prasarana kegiatan ekonomi (0,36), akses modal minim (0,23), pengelolaan SDA (0,22), serta kemiskinan dan kesenjangan (0,17). Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden dalam menentukan prioritas masalah mikro adalah sebesar 26 persen (W = 0,26).
4. Pada *cluster* solusi makro, secara berurutan yang menjadi prioritas dalam memecahkan masalah pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan adalah iklim investasi kondusif (0,33), perencanaan wilayah (0,30),

ciptakan interaksi positif (0,22), dan transmigrasi (0,13). Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden terkait prioritas solusi makro adalah sebesar 45 persen ($W = 0,45$).

5. Pada *cluster* solusi mikro, secara berurutan yang menjadi prioritas dalam memecahkan masalah pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan adalah optimalisasi SDA berkelanjutan (0,292), beri akses modal (0,291), menyerap tenaga kerja (0,22), dan peralatan bisnis (0,18). Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden dalam menentukan prioritas solusi mikro adalah sebesar 29 persen ($W = 0,29$).
6. Pada *cluster* strategi, secara berurutan yang dapat meningkatkan dan mendukung pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan adalah penguatan kapasitas pemda (0,29), peningkatan

kualitas SDM (0,26), kebijakan afirmatif (0,23), beri ruang NGO (0,13), dan bentuk DOB (0,06). Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) antar responden dalam menentukan prioritas strategi untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan adalah sebesar 68 persen ($W = 0,68$).

Rekomendasi

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan, solusi, sekaligus strategi yang dapat dijadikan dasar dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan rekomendasi berupa masukan dan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak akademisi agar dapat melanjutkan penelitian lain yang berkaitan dengan pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya yang

dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Selain itu, diperlukan juga penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan setiap elemen yang terdapat dan dibahas secara singkat dalam penelitian ini. Mengingat penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui permasalahan, solusi, serta strategi yang menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan perbatasan Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi pertahanan.

2. Bagi pihak *stakeholder* agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dan dasar rujukan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan secara komprehensif.

Daftar Pustaka

Buku

Anwar, Effendi. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan: Tinjauan Kritis*. Bogor: P4W Press.

Ambardi, Urbanus dan Socia Prihawantoro. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT.

Ascarya. 2005. *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Kualitatif*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan" (Suatu Tinjauan Yuridis dan Empiris)*. Yogyakarta: Gava Media.

Hartley, Keith and Todd Sandler. 1995. *Handbook of Defense Economic Volume 1*. New York: Elsevier Science.

Hasyim, Abdul Wahid dan Aris Subagiyo. 2017. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Malang: UB Press.

Hikam, Muhammad AS. 2014. *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah*. Jakarta: CV Rumah Buku.

Ishak, Awang Faroek. 2003. *Membangun Wilayah Perbatasan Kalimantan Dalam Rangka Memelihara dan Mempertahankan Integritas Nasional*. Jakarta: Indomedia.

Kurnia, Mahendra Putra. 2010. *Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*. Malang: UB Press.

Mankiw, N. Gregory. 2001. *Principles of Microeconomics*. Second Edition. Philadelphia: Harcourt College Publishers.

Midgley, James. 1995. *Social Development: The Developmental*

Perspective in Social Welfare.
London: SAGE Publications Ltd.

Mrydal, Gunnar. 1971. *Economic Theory and Under-Developed Regions.* New York: Harper Torchbooks.

Noveria, Mita et al. 2016. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi).* Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rusydiana, Aam Slamet dan Abrista Devi. 2013. *Analytic Network Process: Pengantar Teori & Aplikasi.* Bogor: SMART Publishing.

Saaty, Thomas L. 1996. *Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process.* Pittsburgh: RWS Publications.

Saaty, Thomas L and Luis G. Vargas. 2006. *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social, and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks.* USA: Springer.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: CV Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar.* Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2017. *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi.* Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Pusat Studi Pancasila UGM. 2015. *Membangun Kedaulatan Bangsa*

Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (Kumpulan Makalah Call for Papers Kongres Pancasila VII). Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2003. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga.* Edisi Kedelapan, Jilid 1. Alih Bahasa: Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. *Ekonomi Pembangunan.* Edisi Kesebelas, Jilid 1. Alih Bahasa: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wu, Chung-Tong. 2001. "Cross-border Development in a Changing World: Redefining Regional Development Studies", dalam David W Edgington, Antonio L. Fernandez, and Claudia Hoshino, *New Regional Development Paradigms: Volume 2 New Regions – Concepts, Issues, and Practices.* Westport: Greenwood Press.

Yusgiantoro, Purnomo. 2010. *Perekonomian Indonesia.* Limited Edition. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan: Teori & Praktik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Ascarya, dan Diana Yumanita. 2005. "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.* Juni 2005.

Mayona, Enni Lindia, Salahuddin, dan Rahmi Kusmastuti. 2011. "Penyusunan Arah Strategi dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara di Provinsi

Kalimantan Barat”. *Jurnal Tata Loka*. Volume 13, Nomor 2.

Rani, Faisyal. 2012. “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan”. *Jurnal Transnasional*. Volume 4, Nomor 1.

Peraturan / Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

Internet

Anonim. “Sajingan Pilot Project Pembangunan Daerah Tertinggal”, dalam <https://sambas.go.id/component/content/article/1459-sajingan-pilot-project-pembangunan-daerah-tertinggal->, diakses pada 19 Agustus 2018.

Prasetyono, Agus Puji. “Re-Planning Wilayah Perbatasan Indonesia”, dalam <https://www.ristekdikti.go.id/re-planning-wilayah-perbatasan-indonesia/>, diakses pada 24 Agustus 2018.

Raharjo, Sandy Nur Ikkal. “Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia: Sebuah Catatan”, dalam <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/755-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan>, diakses pada 15 Agustus 2018.

Zakiah, Siti. “Kinerja Pelayanan Publik dan Kebutuhan Penataan Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Kalimantan”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/196008-ID-kinerja-pelayanan-publik-dan-kebutuhan-p.pdf>, diakses pada 16 September 2018.

Majalah / Surat Kabar / Buletin

Adi, Wijaya. 2010. “Pendekatan Ekonomi Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan”. *Buletin Kawasan*, Edisi 24, 2010.

Mukti, Sri Handoyo. 2003. “Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Indo-Malay Techno Agropolitan Corridor (IMTAC)”. *Buletin Tata Ruang*, September – Oktober.

Tesis / Disertasi

Bimo, Emanuel Ario. 2018. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Natuna dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan”. *Tesis Magister*. Bogor: Fakultas Manajemen Pertahanan, Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Kurniadi, Dendy. 2009. “Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”. *Tesis Magister*.

Semarang: Program Pascasarjana,
Program Studi Magister Teknik

Pembangunan Wilayah dan Kota,
Universitas Diponegoro.